

PERAN *THE INSTITUTE FOR PEACE AND DEMOCRACY* (IPD) DALAM DEMOKRATISASI DI MYANMAR

Oleh: Wilson Rojeki Sidauruk
Wilson_smart@ymail.com
Pembimbing: Syafri Harto, M.Si

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research explains and proves the role of The Institute for Peace and Democracy (IPD) in growing and developing democractization in Myanmar from military Junta. Myanmar has been led fifty years by military Junta.

Perspective that used in this research is institutionalism perspective. This research also uses the role theory. The theory asserts that the role of political behavior is the behavior of the running political role. This theory assumes that the majority of political behavior is a result of the demands or expectations of the role held by political actors. An institution has the role in giving impact according of their mission. This research also used literatures research methodology by colleting data from many literatures such as books, journals, and websites.

Institute for Peace and Democracy has mission in seeking and finding ways of democracy suitable for Myanmr with cultures and norms of life. IPD cooperate with Myanmar's government and civil society in designing and implementing capacity development programs in the country. IPD has been making some programs that related with democracy and also giving positive impact for Myanmar especially. This research proves that IPD is not only as common institue but also have strong commitment in helping Myanmar to be optimist and go up to get freedom and to be democratic country.

Key words : Democratization, IPD, Myanmar, military junta.

PENDAHULUAN

Ilmu hubungan internasional merupakan disiplin ilmu

pengetahuan yang sangat kompleks,¹ banyak isu yang terkait dengan hubungan internasional, seperti

¹ Goldstein Joshua S. dan Jon. C. Pevenhouse, *International Relation*, United State, Pearson, 2007, Hal. 3.

permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Maka ilmu Hubungan internasional dipelajari interaksi dari berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah dan entitas nasional seperti birokrasi, pemerintah lokal, dan individu.² Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran dari *The Institute Peace and Democracy* (IPD) terhadap demokratisasi Myanmar.

LATAR BELAKANG

Myanmar merupakan negara terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa.³ Myanmar dulunya dikenal dengan nama Burma yang lebih mencerminkan dominasi etnik Burma secara etnis dekat dengan Tibet dan China. Etnik Burma memang mayoritas, sedangkan etnik lainnya yaitu Karen, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin dan kelompok etnis yang lebih kecil lainnya menjadi ancaman keamanan di dalam negeri dan berkaitan dengan gerakan separatis.

Sejak Jenderal Ne Win sampai Jenderal Than Shwe rezim militer menjalankan kebijakan yang sama yakni menghilangkan nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya dengan tatanan

yang bersifat otoriter.⁴ Setiap gerakan demokrasi yang muncul sudah pasti mendapat perlawanan dari rezim yang berkuasa. Secara sistematis rezim militer mampu melemahkan berbagai gerakan oposisi yang muncul dari masyarakat sipil.

Permasalahan Myanmar merupakan masalah internal, penegakan demokrasi yang diprakarsai oleh beberapa kelompok partai dengan dukungan masyarakat luas yang berakhir pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar sehingga atas kejadian ini Myanmar mendapatkan perhatian dan reaksi keras dari dunia internasional dan menjadi sebuah isu global. Kondisi politik domestik Myanmar semakin jauh dari harapan untuk menjadi demokratis dan rasa kekecewaan pun timbul setelah pemerintahan junta militer Myanmar mengeluarkan kebijakan untuk kembali memasukkan aktivis Demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa pimpinan *National League for Democracy* (NLD) ke penjara rumah.⁵

Junta militer mengendalikan setiap aspek yang ada di Myanmar, akses dari berdirinya demokrasi dihambat oleh pihak junta militer. Salah satu penghambatan proses demokrasi di Myanmar yakni dengan tidak melakukan pemilihan umum di Myanmar pada tahun 1990 *State Law*

² Hermawan, Yulius P., *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, Hal. 1.

³ Ashley South. Political Transition in Myanmar: A New for Democratization. *Jurnal Contemporary Southeast Asia* Vol. 26. 2004.

⁴ Adian. M Firmas, 2003. *Prospek Demokrasi di Myanmar*, Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No.2, hal 128-141.

⁵ Daniel Silander, Democracy from the Outsidein, *Social Alternatives* Vol. 24. No.3, Third Quarter 2005, hal 2930.

& Order Restoration Council (SLORC) melaksanakan pemilu dan dimenangkan mutlak oleh *National League for Democracy* (NLD),⁶

Demokrasi bukanlah kata asing yang baru. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi selalu dikaitkan dengan pemerintahan yang mengutamakan rakyat atau lebih dikenal dengan pemerintahan rakyat. Namun pada pelaksanaan demokrasi terdapat variasi model demokrasi dalam pemerintahan dunia. Tiap negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan demokrasi, tergantung dari sistem politik yang dianut. Pandangan - pandangan tersebut dapat menjadi indikator untuk mengukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara.⁷ Oleh karena itu, demokrasi selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam pemerintahan negara. Negara-negara yang telah melakukan demokrasi seperti Amerika Serikat dan India yang kemudian dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Indonesia juga melalui reformasi politik telah diakui sebagai salah satu kekuatan demokrasi ketiga terbesar

di dunia. Dalam pelaksanaannya juga mengalami perubahan-perubahan proses demokrasi tergantung dari sistem politik yang dianut dalam rangka pencarian jati diri bangsa. Sebuah gagasan besar untuk menyelenggarakan forum demokrasi dalam rangka mendorong pengembangan demokrasi dan mempromosikan demokrasi di kawasan Asia dan secara internasional melalui *The Institute Peace and Democracy* (IPD)⁸.

The Institute Peace and Democracy (IPD) merupakan inisiatif Indonesia yang beranggotakan negara-negara di Asia Pasifik untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi serta dapat dicermati sebagai bagian dari peran politik luar negeri Indonesia untuk membentuk institusi internasional dan menyelenggarakan forum dengan mengundang negara – negara sahabat.

IPD bersifat independen dan *non profit*, dan telah melakukan beberapa kegiatan. Lembaga yang membahas mengenai demokrasi dimaksud untuk pertama kalinya dilakukan pada tingkat pemerintah di kawasan Asia. Oleh karena itu, inisiatif penyelenggara dan pembentukan IPD merupakan inspirasi yang fenomenal dalam strategi dan misi diplomasi Indonesia khususnya dalam mendorong pengembangan dan mempromosikan demokrasi di kawasan Asia. Forum ini juga merupakan momentum sejarah dimana perwakilan negara – negara Asia berbicara tentang demokrasi yang sebelumnya masih menjadi sensitif isu di kawasan Asia.

⁶ CSIS, *Proses demokrasi dan kekerasan di Myanmar*,
http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=94&id=41&tab=3, diakses tanggal 21 Maret 2014.

⁷ Gramae Gill, *Liberalization and Democratization in The Union and Russia*, Democratization Vol. 2 No. 3, Autumn 2003, hal. 315.

⁸ Selanjutnya akan disingkat dengan IPD.

IPD juga menjadi tempat bagi inspirasi demokrasi melalui pelaksanaan *Bali Democracy Forum* (BDF) yang direncanakan akan dilakukan setiap tahun. Hal ini menjadi inisiatif yang fenomenal dalam kerjasama kawasan melalui pertukaran pengalaman dan praktek yang terbaik untuk mendorong kuatnya demokrasi yang tidak dipaksakan, tetapi juga bertumbuh dan berkembang dari kekuatan dan kemampuan dari dalam. Oleh karena itu setiap negara dengan sistem politik apapun yang memiliki kemauan untuk mengembangkan demokrasi dapat ikut untuk memberikan kontribusinya dalam pengembangan demokrasi. IPD dilaksanakan berdasarkan keperluan untuk mengatur proses pembelajaran dialog yang komprehensif dalam demokrasi. Dalam hal ini, IPD membuka forum dialog dalam agenda *Bali Democratic Forum* (BDF) yang menjadi *annual* agenda sejak tahun 2008. Dialog dapat meliputi pertukaran pengalaman dan praktek dalam demokrasi. Dialog ini juga bertujuan mempromosikan kerjasama antar negara dalam pengembangan kelembagaan sosial dan politik untuk pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu forum akan mendiskusikan sejumlah isu berkaitan dengan pengembangan demokrasi.

Myanmar merupakan salah satu anggota dari IPD mulai awal insitusi ini dibentuk 2008 sampai sekarang. Padahal Myanmar diawal BDF I yang menjadi forum IPD, asih murni sebagai negara Junta militer. Namun Myanmar turut menghadiri dan menghargai serta mendukung forum ini serta menunjukkan antusiasnya memahami

nilai-nilai demokrasi. Myanmar mulai menyadari bahwa pentingnya demokrasi sebagai salah satu jalan yang membuka peluang besar bagi negaranya untuk mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kebebasan berpartisipasi dalam pemerintahan.

KERANGKA TEORI

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat analisis negara-bangsa. Tingkat analisis ini memfokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh di dalam organisasi internasional. Tingkat analisa ini memiliki asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimana pun berada pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama.

Analisisnya harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa.⁹ Negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil serta berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh negara dan bagaimana negara mengambil kebijakan.

Penelitian ini menggunakan perspektif institusionalisme. Menurut John W. Meyer dan Brian Rowan, menulis tentang institusionalisme yaitu menjelaskan bahwa perilaku

⁹ *Ibid.* Hal 41.

organisasi atau keputusan yang diambil oleh organisasi akan mempengaruhi institusi yang ada di luar organisasi. Organisasi akan menyesuaikan diri dengan tekanan dari luar untuk mempertahankan eksistensinya.¹⁰ Scott (2001) mengatakan bahwa institusi berada pada lingkup struktur sosial, memiliki elemen-elemen simbolis, aktivitas-aktivitas sosial, dan sumberdaya material. Keberadaan institusi diperlukan sebagai seperangkat proses yang dicirikan dengan elemen-elemen regulatif, dan kultural-kognitif yang sarat dengan perubahan. Meskipun unsur-unsur utama dari institusi adalah *rules, norms, and cultural benefit*.¹¹ IPD sebagai institusi internasional memiliki elemen-elemen simbolis, aktivitas sosial, seperti penyelenggaraan forum, seminar, workshop, kerjasama *school of peace, democracy and development* serta adanya aturan-aturan dan norma walaupun tidak mengikat.

Teori yang digunakan adalah teori organisasi internasional. Upaya mendefinisikan organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non negara.¹²

¹⁰ Meyer, Jhon W. Brian Rowan. 1977. *Institutionalized organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*. American Journal Sociology.

¹¹ Scott, W. Rochard. 2001. *Institutions and Organizations*. Thousand Oaks, CA: Sage.

¹² Coulombus, Theodore A, & Wolfe, James H. 1986. *Introduction to International Relation: Power and Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, hal 276

PEMBAHASAN

Pada awal kemerdekaan, Myanmar mengadopsi sistem parlementer seperti yang digunakan oleh Inggris. U Nu menjadi perdana menteri pertama di Myanmar yang berkedudukan di Burma sebagai pusat pemerintahan negara tersebut dan dipimpin langsung oleh U Nu, sementara lima wilayah lainnya yaitu Karen, Kachin, Karenni, Shan dan Divisi Khusus Chin memiliki kepala negaranya sendiri.

Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 dengan nama awal Burma, yang juga merupakan sebagai anggota dari organisasi regional ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Bentuk pemerintahan awal Myanmar pada saat kemerdekaan adalah pemerintahan sipil yang dikepalai oleh seorang presiden yang menganut asas-asas demokrasi. Pemerintahan sipil kemudian dibubarkan karena adanya kudeta militer oleh jenderal Ne Win pada tahun 1962 yang merubah Myanmar menjadi negara otoriter yang menganut asas-asas komunis. Kudeta militer terjadi karena pemerintahan sipil dianggap tidak efektif dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Myanmar.

Pemerintahan otoriter Myanmar terpusat pada satu individu bukan pada institusi, sehingga orang yang berkuasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar untuk mengatur negaranya sesuai keinginannya. Kekuasaan yang terpusat pada individu ini dapat semakin diperkuat dengan adanya koneksi-koneksi pribadi untuk menyempurnakan dominasi totalnya terhadap negara tersebut. Dan hal

itulah yang terjadi saat pemerintahan otoriter Junta Militer berkuasa. Pada saat berkuasa pemerintahan BSPP juga memberikan batasan-batasan untuk mencegah penganut agama non-budha seperti Kristiani dan juga Muslim. Militer juga mengadakan gencatan senjata dengan grup-grup minoritas yang mengadakan pemberontakan dan memperlakukan daerah minoritas tersebut seperti dalam kawasan perang.¹³

Pada tanggal 8 Agustus 1988 terjadi demonstrasi terbesar sepanjang sejarah Myanmar, demonstrasi dilakukan oleh para mahasiswa dan juga tokoh agama atau biksu yang bertujuan untuk meminta agar pemerintahan militer BSPP bersedia untuk mengembalikan pemerintahan ke bentuk semula atau menuntut agar pemerintah dijalankan oleh pemerintahan sipil. Demonstrasi ini ditanggapi dengan perlawanan kekerasan oleh pihak militer dan akhirnya lebih dari 3000 orang demonstran tewas akibat hal tersebut, peristiwa ini membawa kekecewaan oleh Aung San Suu Kyi yaitu tokoh demokrasi Myanmar. Oleh karena itu, pada 15 Agustus 1988 secara resmi Aung San Suu Kyi terjun ke dalam dunia politik. Aung San Suu Kyi juga menyampaikan surat terbukanya agar segera dilaksanakan pemilihan umum dengan multi partai. Namunn Aung San Suu Kyi pada akhirnya berakhir sebagai tahanan politik oleh Junta Militer karena dianggap pemberontak.

¹³ David I Steinberg, Myanmar yang bergerak: Masa Depan Kedudukan Penting Militer, Issue: 14. Myanmar, Dikutip dari: <http://kyotoreview.org/issue-14/myanmar-yang-bergerak-masa-depan-kedudukan-penting-militer/>. Pada tanggal: 4 Desember 2014, Pukul 13.33.

Penahanan Aung San Suu Kyi menjadi salah satu berita besar bagi dunia internasional dan kekecewaan atas apa yang telah terjadi terhadap pemerintahan Myanmar.¹⁴

Selama Junta Militer SPDC berkuasa, perekonomian Myanmar cenderung mengalami penurunan karena SPDC mengeluarkan dana yang besar dalam bidang militer dibandingkan dengan yang lainnya seperti pendidikan, pelayanan umum dan juga kesehatan. Hingga tahun 2011 yaitu saat SPDC berakhir kekuasaannya tercatat bahwa Myanmar selalu mengalami krisis ekonomi bahkan Myanmar pada saat ini dikategorikan sebagai negara miskin dunia. Selain itu, pemerintahan SPDC juga mengalami pemindahan ibu kota negara yang sebelumnya Yangon menjadi Naypyidaw yang mana sangat menguras keuangan Myanmar untuk melakukan pembangunan terhadap ibu kota negara yang baru. Myanmar juga tercatat sebagai negara dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia tertinggi, tidak ada kebebasan pers, serta dilarangnya melakukan perkumpulan masyarakat. Banyak tekanan dan juga ancaman yang dilakukan oleh negara lain atau dunia internasional atas keadaan yang terjadi di Myanmar. Pada umumnya dunia internasional menuntut agar Myanmar memperhatikan HAM dan mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada sipil. Ancaman ini mulai dirasakan oleh Myanmar ketika Myanmar mengalami masalah perbankan, krisis finansial dan

¹⁴ Dami Agung, Sejarah Junta Militer. Dikutip dari: https://academia.edu/4643278/Sejarah_junta_militer_myanmar, pada tanggal : 11 Juni 2014, pukul 13:43 WIB.

perekonomian yang jatuh yaitu pada tahun 2003. Pada saat itu juga negara-negara barat umumnya memutuskan hubungannya dengan Myanmar serta memberi sanksi, memberlakukan blokade ekonomi. Kekuasaan Junta Militer mulai rapuh yaitu terlihat dengan dilakukannya referendum konstitusi pada tahun 2005. Hal ini dilakukan karena pemerintah mulai khawatir dengan negara organisasi kawasan ASEAN yang selalu menuntut agar terjadinya reformasi politik di Myanmar.

Pada tahun 2007, U Thein Sein terpilih menjadi perdana menteri SPDC karena memiliki karir sebelumnya yang dianggap bisa membawa masa depan Myanmar lebih cemerlang. Secara umum U Thein Sein memiliki pemikiran yang lebih demokratis dan cenderung ingin melakukan perubahan-perubahan yang besar di Myanmar. Oleh karena itu kerapuhan demi kerapuhan tampak di kekuasaan Junta Militer yang mana hingga memaksa mereka melakukan pemilihan umum pada 7 November 2010. berubah menjadi negara demokrasi yang dikepalai oleh seorang presiden sipil dan yang terpilih adalah U Thein Sein yang berasal dari partai *Union Solidarity Development Party* (USDP) yang sebelumnya juga merupakan perdana menteri Myanmar. Negara Myanmar sejak pemilihan umum 2010 tersebut menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Lembaga legislatif di Myanmar terdiri atas dua kamar, yaitu *House of Nationalities* (*Amyotha Hluttaw*) sebagai kamar atas dan *House of Representatives* (*Pyithu Hluttaw*) sebagai kamar bawah. Gabungan antara kedua kamar disebut sebagai

Assembly of the Union (*Pyidaungsu Hluttaw*), yang juga terdapat di tingkat regional (*Regional Assembly*) atau negara bagian (*State Assembly*).¹⁵ Dengan melihat hasil dari pemilihan umum 2010 tersebut dapat dikatakan bahwa Myanmar telah melaksanakan pemilu dengan baik dengan mengikuti pemilihan umum multi partai.

Sepanjang transisi pemerintahan negara dalam demokratisasi, *The Institute for Peace and Democracy* (IPD) mengambil peran dalam penanaman dan pemahaman nilai-nilai demokrasi bagi negara Myanmar. Hal ini dilakukan melalui *Bali Democracy Forum* pada tahun 2008.

Dalam BDF I, Myanmar mengambil komitmen untuk Memperkuat dan mengembangkan proses elektoral, meningkatkan peranan partai politik, menjunjung tinggi peran hukum dan memperkuat integritas dan kapasitas yudisial, mengembangkan dan memelihara *check-and-balance* diantara badan-badan penyelenggara pemerintahan. mempromosikan *Good Governance* (transparansi dan akuntabilitas), mempromosikan demokrasi dan perkembangan sosial ekonomi, termasuk didalamnya ketahanan ekonomi nasional dan kawasan, memastikan akses kepada basis informasi publik, memastikan akses untuk kebutuhan publik, menyuburkan peranan wanita dan persamaan gender, menumbuhkan

¹⁵ Aldrin Rocky Sampeliling, *Demokrasi di Myanmar: Pemilihan Umum 2010 dan 2012*. Dikutip dari: <http://aldrinrocky.weebly.com/journal/demokrasi-di-myanmar-pemilihan-umum-2010-dan-2012>. Pada tanggal: 11 Desember 2014, pukul 11:29 WIB.

kultur demokrasi, perdamaian, dan harmoni, menyuburkan partisipasi kelompok sipil dan pemuda, mempromosikan peranan media massa dalam komunitas demokrasi, memajukan penggunaan IT untuk mempromosikan komunikasi politik.

Dalam BDF II, Myanmar turut menyepakati. Meskipun demokrasi dan perkembangan pembangunan adalah dua konsep yang berbeda namun terkait, proses keduanya dapat memperkuat antara satu dan lainnya. Forum sepakat bahwa untuk mengembangkan bidang-bidang prioritas untuk kerjasama dalam demokrasi sebagai agenda strategis dan untuk mempromosikan sinergi antara demokrasi dan perkembangan pembangunan di Asia dan dalam bentuk kerjasama regional lainnya. Forum menggaris bawahi adanya kebutuhan bagi usaha bersama untuk meningkatkan pembangunan kapasitas di bidang demokrasi dan peranan integral kaum wanita dalam demokrasi.

Dalam BDF III, Myanmar sepakat menyatakan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang dinegara yang memiliki supremasi hukum, good governance, dan media massanya menikmati kebebasan dan komunitas sipilnya diperkuat dan memiliki akses terhadap informasi. Kebebasan dan media yang bertanggung jawab sebagai factor penting dalam pencapaian demokrasi yang berkelanjutan dan akuntabilitas publik.

Dengan mempertimbangkan bahwa komunitas sipil mewakili suara rakyat yang beragam, mengakui semakin pentingnya untuk

mendorong dan memperkuat komunitas sipil dihadapan perkembangan global. Meningkatkan iklim demokratis akan menghasilkan suasana kondusif untuk kelompok sipil dan akan mendorong partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi aktif penduduk dalam proses pembuatan kebijakan seperti halnya juga keterbukaan dan transparansi dalam bagian kewenangan adalah prasyarat untuk berfungsinya demokrasi yang mampu untuk menghasilkan good governance bagi masyarakat.

Mereka menerima bahwa semenjak pertumbuhan demokrasi di suatu kawasan dipicu oleh kebijaksanaan lokal dan tradisional, nilai-nilai dan prakteknya, maka tidak ada satu model demokrasi yang sesuai untuk semua kelompok. Demokrasi harus ditumbuhkan dari akar rumput melalui proses yang gradual dan incremental yang meningkatkan sistem politik. Akan tetapi, sementara sistem demokrasi tidak seharusnya dipaksakan dari luar, ia haruslah tetap harmonis dengan nilai-nilai dasar demokrasi. Harus dimengerti bahwa meniru jalan pihak lain dalam proses demokrasi tidak selalu berujung pada diterimanya demokrasi itu sendiri.

Mereka menyadari tentang pentingnya untuk melindungi pluralism dan keberagaman jika ingin demokrasi itu tumbuh kuat. Mereka menekankan bahwa pendekatan terhadap demokrasi harus bervariasi menurut latar belakang politik, ekonomi, dan sosial negara dimana demokrasi itu tumbuh. Meskipun demikian, terlepas dari beragamnya pendekatan yang dilakukan, mereka secara teguh berkomitmen pada promosi nilai-

nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, dan bersatu dalam determinasi mereka untuk membagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik dalam proses untuk menyuburkan demokrasi. Penghargaan terhadap keberagaman dan saling berdampingannya norma-norma yang berbeda, kepercayaan dan kultur, menyusun kekuatan demokrasi. Bagi demokrasi untuk dapat berjalan dengan baik, sangat penting untuk mengenali dan secara berhati-hati mengatur keberagaman etnis, kultur dan identitas dan untuk membuat keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Demokrasi dapat dipertahankan hanya jika terdapat iklim yang kondusif bagi perkembangannya. Beberapa negara telah berhasil untuk memperdalam iklim demokrasi melalui pergantian pemerintahan yang berlangsung damai melalui pemilihan yang demokratis. Meskipun demikian, tetap dipertegas bahwa pemilihan umum yang teratur bukanlah satu-satunya faktor terhadap pencapaian nilai-nilai demokrasi. Faktor penting lainnya termasuk *good governance*, penghargaan terhadap HAM, dan adanya supremasi hukum. Tidak ada kelompok atau komunitas demokratis yang tumbuh dalam semalam, sebab hal ini hanya bisa dicapai melalui sebuah proses yang melibatkan serangkaian pendekatan, dialog, dan perencanaan yang berhati-hati.

Demokrasi tidak hanya mewakili keinginan kalangan mayoritas, namun sebagai alat untuk membangun konsensus bersama. Oleh karenanya, demokrasi harus bersifat inklusif, responsive terhadap aspirasi rakyat, dan dipandang oleh masyarakat dengan perasaan memiliki. Agar hal ini dapat

menjadi nyata, demokrasi harus ditumbuh-suburkan dalam iklim keterbukaan, penghormatan terhadap HAM, dan supremasi hukum.

Usaha untuk mendorong partisipasi demokrasi itu bukanlah tanpa halangan. Oleh karenanya, amatlah mendasar bagi tantangan ini untuk dihadapi dengan sikap yang demokratis. Demokrasi yang kuat dan menguntungkan membuat suatu negara dapat mengatasi permasalahan dan tantangan jaman. Demokrasi tidak hanya mengurangi kemiskinan, kemunduran ekonomi, dan tantangan waktu, namun juga membuka kesempatan untuk perkembangan ekonomi, sosial, dan politik.

IPD mengadakan kunjungan dan kerjasama dengan pemerintah Myanmar.¹⁶ Kunjungan Bp. Dr. N. Hassan Wirajuda beserta delegasi sebagai kunjungan balasan kepada Penasihat Presiden Myanmar dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Myanmar yang sebelumnya telah berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Bp. Hassan Wirajuda selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk menjajaki kerjasama yang dapat dikembangkan pada tingkat *track 2*, khususnya terkait peran Indonesia mendorong proses transisi demokrasi di Myanmar. Dalam kaitan itu, Bp. Hassan Wirajuda berkesempatan untuk memberikan ceramah umum di hadapan peserta *School of Peace*,

¹⁶ Kunjungan IPD ke Myanmar, dapat diakses di http://kbriyangon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147, diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 22:17 WIB.

Democracy and Development. Selain itu, Bp. Hassan juga melakukan pertemuan dengan beberapa pihak lainnya antara lain *Group of Friends of Democratic Parties, Chief Minister* (Gubernur) wilayah Yangon dan Bago, *Union Election Commission* (KPU), serta pertemuan dengan Daw Aung San Suu Kyi.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi di Myanmar sangat signifikan, khususnya dalam perspektif ekonomi dan sosial budaya. Kota Yangon telah berkembang secara dinamis yang ditandai dengan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur serta roda ekonomi yang bergerak positif. Kegiatan pembangunan infrastruktur juga terlihat di ibukota negara di Nay Pyi Daw, khususnya dalam menyambut penyelenggaraan SEA Games tahun 2013 serta persiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014.

Perubahan di bidang politik masih dilakukan secara bertahap dan terlihat berhati-hati. Beberapa perubahan penting di bidang politik dan dalam beberapa waktu terakhir antara lain diterbitkannya UU mengenai Kebebasan Pers. Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka Myanmar memasuki babak baru dari transisi demokrasi, khususnya dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia (HAM) untuk memperoleh akses terhadap informasi yang disampaikan kalangan pers. Namun demikian, dari beberapa pertemuan dengan pihak-pihak terkait, didapatkan nuansa sentralisme dalam pengambilan keputusan-keputusan tertentu oleh pemerintah pusat (Republik Uni Myanmar).

IPD telah menjadi institusi utama bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pandangan konstruktif, ide dan pelajaran demokrasi tanpa penilaian atau pemaksaan. Ini menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mengambil bagian tanpa beban pretensi. Peristiwa terakhir di seluruh dunia telah membuat pekerjaan IPD semakin signifikan. Di Asia Tenggara, Myanmar mengadakan pemilihan umum dan mempercepat transisi politik sebagai bagian dari peta jalan menuju demokrasi. IPD menyatakan dukungan bagi Myanmar karena terus berupaya memajukan reformasi dan pembangunan demokrasi, terutama untuk mencapai rekonsiliasi dan perdamaian abadi.¹⁷

IPD bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil Myanmar dalam merancang dan melaksanakan program pembang peningkatkan kapasitas di negeri itu. Adanya 28 peserta BDF VI yang berasal dari Myanmar, yang sebelumnya telah mengikuti workshop kepemimpinan dan reformasi partai politik yang diselenggarakan IPD.¹⁸ Selain itu cukup aktif memberikan training, bagi para anggota komisi pemilihan

¹⁷ IPD berbagi pandangan konstruktif, ide dan pelajaran demokrasi tanpa penilaian atau pemaksaan, dapat diakses dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/167-januari-2012/1311-bali-democracy-forum-berbagi-pandangan-konstruktif-ide-dan-pelajaran-demokrasi-tanpa-penilaian-atau-pemaksaan.html>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 22:37 WIB.

¹⁸ Institut Perdamaian dan Demokrasi dari Bali untuk Dunia. Dapat diakses dalam <http://old.setkab.go.id/berita-10969-institut-perdamaian-dan-demokrasi-dari-bali-untuk-dunia.html>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 22:40 WIB.

umum di Myanmar.¹⁹ Pada pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait dimaksud telah dibahas mengenai kerjasama yang lebih konkrit dalam upaya membantu Myanmar menjalani transisi demokrasi, khususnya melalui *track 2*, termasuk memajukan peran *Institute for Peace and Democracy* (IPD) untuk membantu *capacity building* institusi terkait di Myanmar. Salah satu peninjauan yang dilakukan adalah menjadikan *School of Peace, Democracy and Development* yang berada di bawah naungan *Myanmar Development and Research Institute* (MDRI) sebagai *counterpart* dari IPD.

KESIMPULAN

Demokrasi bukanlah suatu hal yang bisa dipaksakan dari luar. Demokrasi perlu untuk sesuai dengan nilai-nilai lokal suatu masyarakat, untuk dapat diterapkan di masyarakat tersebut. Inilah peluang bagi *Institut for Peace and Democracy* dalam mencari dan menemukan cara-cara penerapan demokrasi yang sesuai bagi negara-negara dengan kultur budaya dan norma-norma hidup yang berbeda-beda. Proses diskusi dan berbagi pengalaman ini juga memungkinkan terjadinya interaksi lebih jauh diantara para peserta yang berasal dari berbagai negara yang berbeda-beda, sehingga proses pengenalan dan penyamaan persepsi dapat berlangsung secara lebih mendalam.

IPD bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil Myanmar dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan peningkatan kapasitas di negeri itu. Perwakilan dari Myanmar telah mengikuti workshop kepemimpinan dan reformasi partai politik yang diselenggarakan IPD. Selain itu cukup aktif memberikan training, bagi para anggota komisi pemilihan umum di Myanmar. Di dalam mendukung kinerja dari *Institut for Peace and Democracy*, maka membutuhkan adanya forum internasional yaitu *Bali Democracy Forum* yang mengedepankan diskusi dan berbagi pengalaman juga sesuai dengan koridor diplomasi Indonesia yang mengedepankan *soft power* dalam mencari dan menemukan akar permasalahan yang menghalangi terjadinya proses demokrasi terutama di Myanmar. *Bali Democracy Forum* adalah sebuah forum tahunan yang dimulai semenjak tahun 2008, yang bertujuan untuk mempromosikan demokrasi dan memajukan proses demokrasi di kawasan Asia Pasifik pada khususnya, dan dunia pada umumnya. Forum ini digagas oleh pemerintah Indonesia, dan pada awalnya dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2008, bertempat di Bali dengan Australia sebagai pelaksana bersama. Forum ini menjadi agenda dari *The Institute for Peace and Democracy* setiap tahunnya. IPD mengadakan kunjungan dan kerjasama dengan pemerintah Myanmar. Pada pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait dimaksud telah dibahas mengenai kerjasama yang lebih konkrit dalam upaya membantu Myanmar menjalani transisi demokrasi, khususnya melalui *track*

¹⁹ Indonesia akan terus dorong demokrasi di Asia Tenggara. Dapat diakses dalam <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-akan-terus-dorong-demokrasi-di-asia-tenggara/1635260.html>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 22:45 WIB.

2, termasuk memajukan peran *Institute for Peace and Democracy* (IPD) untuk membantu *capacity building* institusi terkait di Myanmar. Salah satu peninjauan yang dilakukan adalah menjadikan *School of Peace*,

Democracy and Development yang berada di bawah naungan *Myanmar Development and Research Institute* (MDRI) sebagai *counterpart* dari IPD.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adian. M Firmas, 2003. *Prospek Demokrasi di Myanmar*, Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No.2

Ashley South. Political Transition in Myanmar: A New for Democratization. Jurnal Contemporary Southeast Asia Vol. 26. 2004.

Daniel Silander, Democracy from the Outsidein, Social Alternatives Vol. 24. No.3, Third Quarter 2005,

Gramae Gill, *Liberalization and Democratization in The Union and Russia*, Democratization Vol. 2 No. 3, Autumn 2003,hal. 315.

Buku dan Artikel

Coulombus, Theodore A, & Wolfe, James H. 1986. *Introduction to International Relation: Power and Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, hal 276

David I Steinberg, Myanmar yang bergerak: Masa Depan Kedudukan Penting Militer, Issue: 14.

Goldstein Joshua S. dan Jon. C. Pevenhouse, *International*

Relation, United State, Pearson, 2007

Hermawan, Yulius P., *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007

Meyer, Jhon W. Brian Rowan. 1977. *Institusionalized organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*. American Journal Sciology.

Scott, W. Rochard. 2001. *Institutions and Organizations*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Website

CSIS, *Proses demokrasi dan kekerasan di Myanmar*, http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=94&id=41&tab=3 diakses tanggal 21 Maret 2014.

Dami Agung, Sejarah Junta Militer. Dikutip dari: https://academia.edu/4643278/Sejarah_junta_militer_myanmar, pada tanggal : 11 Juni 2014, pukul 13:43 WIB.

Aldrin Rocky Sampeliling, *Demokrasi di Myanmar: Pemilihan Umum 2010 dan*

2012. Dikutip dari:
<http://aldrinrocky.weebly.com/journal/demokrasi-di-myanmar-pemilihan-umum-2010-dan-2012>. Pada tanggal: 11 Desember 2014, pukul 11:29 WIB.

Indonesia akan terus dorong demokrasi di Asia Tenggara. Dapat diakses dalam

<http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-akan-terus-dorong-demokrasi-di-asia-tenggara/1635260.html>.

Diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 22:45 WIB.

Kunjungan IPD ke Myanmar, dapat diakses di

http://kbriyangon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147, diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 22:17 WIB.

IPD berbagi pandangan konstruktif, ide dan pelajaran demokrasi tanpa penilaian

atau pemaksaan, dapat diakses dalam
<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/167-januari-2012/1311-bali-democracy-forum-berbagi-pandangan-konstruktif-ide-dan-pelajaran-demokrasi-tanpa-penilaian-atau-pemaksaan.html>.

Diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 22:37 WIB.

Institut Perdamaian dan Demokrasi dari Bali untuk Dunia. Dapat diakses dalam

<http://old.setkab.go.id/berita-10969-institut-perdamaian-dan-demokrasi-dari-bali-untuk-dunia.html>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 22:40 WIB.